

# Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Ketimpangan Antarwilayah Di Nusa Tenggara Barat

Nurul Inayah<sup>1)</sup>, Baiq Ismiwati<sup>2)</sup>, Ahmad Zaenal Wafik<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Mataram, NTB, Indonesia

e-mail: <sup>1</sup>[nurulmachi06@gmail.com](mailto:nurulmachi06@gmail.com), <sup>2</sup>[ismiwati2010@unram.ac.id](mailto:ismiwati2010@unram.ac.id), <sup>3</sup>[aazaenal\\_wafik@unram.ac.id](mailto:aazaenal_wafik@unram.ac.id)

Article Information

Submit: 28-05-2026

Revised: 10-09-2026

Accepted: 25-09-2026

## Abstract

*This study was conducted to analyze the effect of fiscal decentralization on development inequality between districts/cities in West Nusa Tenggara Province during the 2020–2024 period. The variables used include Local Own-Source Revenue, Revenue Sharing Fund, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund, while regional inequality is measured using the Williamson Index. This study uses a quantitative approach with panel data obtained from the Central Statistics Agency and the Directorate General of Fiscal Balance. The analysis was conducted using panel data regression to determine the effect of each variable on regional development inequality. The results show that Local Own-Source Revenue has a negative but not statistically significant effect on regional inequality, which means that an increase in Local Own-Source Revenue has not been able to provide a strong influence on regional development equity. Revenue Sharing Fund has a positive but not significant effect on inequality due to the distribution of revenue being more concentrated in regions with greater resource potential and economic activity. General Allocation Fund has a positive and significant effect on regional inequality, which indicates that an increase in the General Allocation Fund tends to increase development inequality between regions. Meanwhile, Special Allocation Fund has a negative and significant impact on inequality, which means that increasing the Special Allocation Fund can help reduce development inequality through infrastructure development and priority public services.*

**Keywords:** Regional Transfer Funds, Fiscal Decentralization, Williamson Index, Development Inequality, Local Own-Source Revenue.

## Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap ketimpangan pembangunan antarkabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024. Variabel yang digunakan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan ketimpangan wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Analisis dilakukan menggunakan regresi data panel untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap ketimpangan pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif namun tidak signifikan secara statistik terhadap ketimpangan wilayah, yang berarti peningkatan PAD belum mampu memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemerataan pembangunan daerah. DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan akibat distribusi penerimaannya lebih terkonsentrasi pada daerah dengan potensi sumber daya dan aktivitas ekonomi yang lebih besar. DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan wilayah, yang menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antardaerah. Sementara itu, DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, yang berarti peningkatan Dana Alokasi Khusus dapat membantu mengurangi ketimpangan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik prioritas.

**Kata kunci:** Dana Transfer Daerah, Desentralisasi Fiskal, Indeks Williamson, Ketimpangan Pembangunan, Pendapatan Asli Daerah.

## PENDAHULUAN

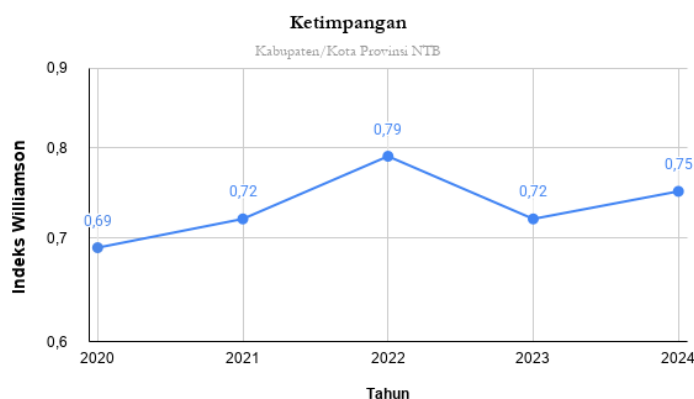
Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan hasil pembangunan antarwilayah. Namun, dalam praktiknya pembangunan sering kali menimbulkan perbedaan tingkat kemajuan antar daerah akibat ketidaksamaan potensi ekonomi, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, serta

kapasitas fiskal masing-masing wilayah. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Penerapan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan dan keuangan daerah. Dalam kerangka tersebut, desentralisasi fiskal menjadi salah satu instrumen penting untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Kuncoro, 2018; Mardiasmo, 2018).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan transfer fiskal dari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah agar setiap wilayah mampu melaksanakan pembangunan secara optimal. Akan tetapi, dalam implementasinya masih terdapat perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah di Provinsi NTB. Daerah dengan basis ekonomi kuat seperti Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kemampuan fiskal yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional seperti Lombok Utara, Dompu, dan sebagian wilayah Kabupaten Bima. Perbedaan struktur ekonomi tersebut menyebabkan distribusi pembangunan belum berlangsung secara merata (Todaro & Smith, 2011).

Ketimpangan pembangunan di Provinsi NTB juga terlihat dari perbedaan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) antar kabupaten/kota. Kabupaten Sumbawa Barat memiliki kontribusi ekonomi yang besar karena ditopang sektor pertambangan, sedangkan Kota Mataram berkembang melalui sektor jasa, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Sebaliknya, beberapa wilayah lain masih mengandalkan sektor pertanian tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga memunculkan disparitas pembangunan antarwilayah. Untuk melihat tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah secara kuantitatif, penelitian ini menggunakan Indeks Williamson sebagai alat ukur ketimpangan regional. Indeks Williamson digunakan untuk mengukur sejauh mana PDRB per kapita masing-masing daerah menyimpang dari rata-rata provinsi dengan mempertimbangkan jumlah penduduk. Nilai indeks yang semakin mendekati nol menunjukkan tingkat ketimpangan yang rendah, sedangkan nilai yang semakin mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi (Williamson dalam Gluschenko, 2015).

**Gambar 1.** Perkembangan Ketimpangan Antarwilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber: Data diolah dari BPS Provinsi NTB (2025a)

Berdasarkan grafik Indeks Williamson Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024, tingkat ketimpangan pembangunan antarwilayah di NTB menunjukkan pola yang berfluktuasi. Pada tahun 2020 nilai Indeks Williamson tercatat sebesar 0,69, kemudian meningkat menjadi 0,72 pada tahun 2021 dan kembali meningkat menjadi 0,79 pada tahun 2022. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi NTB cenderung semakin besar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan masih terkonsentrasi pada beberapa wilayah tertentu yang memiliki kapasitas ekonomi dan fiskal lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya.

Peningkatan ketimpangan pada tahun 2021 hingga 2022 juga dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 yang belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah. Daerah yang memiliki sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertambangan mampu mengalami pemulihan ekonomi lebih cepat dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional. Selain itu, perbedaan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah serta pemanfaatan transfer fiskal turut memengaruhi tingkat pembangunan antarwilayah (Sjafrizal, 2018).

Pada tahun 2023 nilai Indeks Williamson mengalami penurunan menjadi 0,72. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pemerataan pembangunan antar daerah meskipun tingkat ketimpangan masih tergolong tinggi. Namun demikian, pada tahun 2024 nilai indeks kembali meningkat menjadi 0,75. Perubahan arah ini perlu dijelaskan dari sisi kebijakan fiskal daerah, karena penurunan indeks pada 2023 dan kenaikan pada 2024 diduga berkaitan dengan perubahan alokasi dan realisasi dana transfer serta arah belanja daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan pembangunan di Provinsi NTB masih menghadapi berbagai tantangan sehingga ketimpangan antarwilayah belum dapat ditekan secara konsisten. Secara umum, nilai Indeks Williamson yang berada pada kisaran 0,69 hingga 0,79 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Provinsi NTB masih relatif tinggi. Tingginya tingkat ketimpangan tersebut mencerminkan adanya perbedaan kapasitas fiskal, infrastruktur, investasi, dan aktivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi NTB.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan desentralisasi fiskal belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perbedaan kapasitas fiskal, struktur ekonomi daerah, serta efektivitas pengelolaan dana transfer daerah diduga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota. Dari sisi empiris, NTB menarik dikaji karena memiliki struktur ekonomi yang kontras antara wilayah berbasis pertambangan (Kabupaten Sumbawa Barat), jasa dan perdagangan (Kota Mataram), serta wilayah agraris, dan karena indeks ketimpangannya berfluktuasi pada kisaran yang relatif tinggi selama 2020–2024. Penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada tingkat nasional atau di provinsi lain, misalnya Provinsi Jambi (Sidik & Hidayat, 2020), sedangkan kajian dengan data panel kabupaten/kota di NTB pada periode 2020–2024 belum banyak dilakukan; inilah celah yang diisi oleh penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap ketimpangan antarwilayah menjadi penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan desentralisasi fiskal mampu mendukung pemerataan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan tujuan kebijakan desentralisasi fiskal dan kajian teoretis, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H2: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H3: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H4: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

H5: PAD, DBH, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2020–2024. Pendekatan asosiatif digunakan untuk melihat hubungan serta pengaruh antarvariabel penelitian, baik secara parsial maupun simultan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta instansi terkait lainnya. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data *time series* dan *cross section* pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB selama periode penelitian. Variabel independen yang digunakan meliputi PAD, DAU, DAK, dan DBH, sedangkan variabel dependennya adalah ketimpangan antarwilayah yang diukur menggunakan Indeks Williamson.

### Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan software E-Views 12. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun simultan. Berikut persamaan regresi data panel dalam penelitian ini :

$$LN_{Yit} = \beta_0 + \beta_1 LN_{PADit} + \beta_2 LN_{DBH_{it}} + \beta_3 LN_{DAU_{it}} + \beta_4 LN_{DAK_{it}} + e_{it}$$

Keterangan :

$Y_{it}$  = LN Indeks Williamson (ketimpangan antarwilayah)

$\beta_0$  = Koefisien intersep/konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = Koefisien Regresi

$X1_{it}$  = LN Pendapatan Asli Daerah (PAD), dalam miliar rupiah

$X2_{it}$  = LN Dana Bagi Hasil (DBH), dalam miliar rupiah

$X3_{it}$  = LN Dana Alokasi Umum (DAU), dalam miliar rupiah

$X4_{it}$  = LN Dana Alokasi Khusus (DAK), dalam miliar rupiah

$e$  = *error term*

$i$  = Kabupaten/Kota di Provinsi NTB

$t$  = Periode Waktu

Seluruh variabel penelitian (Indeks Williamson, PAD, DBH, DAU, dan DAK) ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (LN). Transformasi ini dilakukan karena data fiskal bernilai besar (miliar rupiah) sedangkan Indeks Williamson berada pada rentang 0–1, sehingga skala variabel menjadi sebanding dan koefisien regresi dapat diinterpretasikan sebagai elastisitas. Model regresi data panel yang digunakan terdiri atas *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier. Setelah model terbaik diperoleh, tahapan selanjutnya yaitu melakukan uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen dalam menjelaskan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian yang dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam pengestimasi data panel. Adapun hasil pengujian spesifikasi model menggunakan Uji Chow dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Uji Chow**

| Effects Test             | Statistic  | d.f.   | Prob.  |
|--------------------------|------------|--------|--------|
| Cross-section F          | 34.987713  | (9,36) | 0.0000 |
| Cross-section Chi-square | 113.847610 | 9      | 0.0000 |

Sumber: Hasil Output EViews 12

Berdasarkan hasil pengujian spesifikasi model menggunakan Uji Chow, diperoleh nilai probabilitas sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect Model* (FEM) dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu, pengujian selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu Uji Hausman.

#### Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Random Effect Model* (REM) dan *Fixed Effect Model* (FEM) dalam estimasi data panel. Adapun hasil pengujian spesifikasi model dengan menggunakan Uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Uji Hausman**

#### Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

| Test Summary         | Chi-Sq. Statistic | Chi-Sq. d.f. | Prob.  |
|----------------------|-------------------|--------------|--------|
| Cross-section random | 1.241566          | 4            | 0.8712 |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Hasil Uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas Cross-section random sebesar  $0,8712 > 0,05$ . Hal ini mengindikasikan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih sesuai digunakan dibandingkan *Fixed Effect Model* (FEM). Oleh karena itu, REM dipilih sebagai model terbaik dalam analisis data panel penelitian ini.

#### Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier merupakan pengujian yang digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM) dalam estimasi data panel. Adapun hasil pengujian spesifikasi model menggunakan Uji Lagrange Multiplier dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Uji Lagrange Multiplier (LM)**  
**Lagrange Multiplier Tests for Random Effects**  
**Null hypotheses: No effects**

|               | Test Hypothesis      |                      |                      |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | Cross-section Time   |                      | Both                 |
| Breusch-Pagan | 74.25684<br>(0.0000) | 1.338540<br>(0.2473) | 75.59538<br>(0.0000) |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier, diperoleh nilai probabilitas Breusch-Pagan pada *cross-section* sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model* (CEM). Dengan demikian, model REM dipilih sebagai model estimasi data panel dalam penelitian ini.

### Uji Asumsi Klasik

Dalam analisis regresi data panel, pengujian asumsi klasik pada umumnya mencakup uji normalitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas. Akan tetapi, pengujian tersebut tidak seluruhnya wajib dilakukan karena menyesuaikan dengan model estimasi yang digunakan. Model *Random Effect* menggunakan pendekatan *Generalized Least Square* (GLS) yang mampu mengatasi permasalahan heteroskedastisitas dalam data panel. Selain itu, autokorelasi umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* sehingga pengujiannya tidak terlalu ditekankan dalam regresi data panel (Basuki & Prawoto, 2021).

Sejalan dengan pendapat tersebut, penggunaan metode *Generalized Least Square* (GLS) pada *Random Effect Model* (REM) dapat meminimalkan masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas dalam model regresi panel (Gujarati & Porter, 2009). Oleh karena itu, karena model terbaik dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model* (REM), maka pengujian asumsi klasik yang dilakukan hanya terbatas pada uji multikolinearitas. Adapun hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat sebagai berikut:

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan salah satu pengujian dalam asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas terjadi ketika dua atau lebih variabel bebas memiliki korelasi yang kuat, sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan pada estimasi koefisien regresi. Kondisi tersebut mengakibatkan model kesulitan dalam menjelaskan pengaruh masing-masing variabel independen secara tepat terhadap variabel dependen. Selain itu, adanya multikolinearitas dapat menyebabkan nilai standar error menjadi lebih besar sehingga hasil pengujian statistik menjadi kurang akurat dan interpretasi model menjadi lemah (Gujarati & Porter, 2009).

**Tabel 4. Uji Multikolinearitas**

|     | X1(PAD)  | X2(DBH)   | X3(DAU)   | X4(DAK)  |
|-----|----------|-----------|-----------|----------|
| PAD | 1.00000  | 0,213049  | 0,583544  | 0,472163 |
| DBH | 0,213049 | 1.00000   | -0,029707 | 0,117301 |
| DAU | 0,583544 | -0,029707 | 1.00000   | 0,768856 |
| DAK | 0,472163 | 0,117301  | 0,768856  | 1.00000  |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan hasil output pada tabel 4 diatas dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dari variabel X1, X2, X3 dan X4 karena nilai koefisien dari semua variabel independen < 0,8 yang berarti tidak ada masalah multikolinieritas.

### Analisis Regresi Data Panel

Hasil pengolahan data dengan menggunakan *Random Effect Model* dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 5. berikut:

**Tabel 5. Regresi Data Panel**

**Dependent Variable: Y**

**Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)**

**Date: 03/10/26 Time: 06:33**

**Sample: 2020 2024**

**Periods included: 5**

**Cross-sections included: 10**

**Total panel (balanced) observations: 50**

**Swamy and Arora estimator of component variances**

| Variable            | Coefficient | Std. Error         | t-Statistic | Prob.  |
|---------------------|-------------|--------------------|-------------|--------|
| C                   | -9.067788   | 4.131093           | -2.195010   | 0.0334 |
| PAD                 | -0.454179   | 0.247726           | -1.833389   | 0.0734 |
| DBH                 | 0.166061    | 0.125280           | 1.325522    | 0.1917 |
| DAU                 | 1.975958    | 0.773504           | 2.554554    | 0.0141 |
| DAK                 | -0.678676   | 0.144539           | -4.695446   | 0.0000 |
| Weighted Statistics |             |                    |             |        |
| Root MSE            | 0.322103    | R-squared          | 0.376009    |        |
| Mean dependent var  | -0.225975   | Adjusted R-squared | 0.320544    |        |
| S.D. dependent var  | 0.411901    | S.E. of regression | 0.339527    |        |
| Sum squared resid   | 5.187526    | F-statistic        | 6.779118    |        |
| Durbin-Watson stat  | 1.887559    | Prob(F-statistic)  | 0.000233    |        |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Hasil penelitian ini menggunakan *random effect* model dapat dibuat persamaan model regresi data panel sebagai berikut:

$$LN_Y = -9,0678 - 0,4542LN_{PAD} + 0,1661LN_{DBH} + 1,9760LN_{DAU} - 0,6787LN_{DAK} + e$$

Dari model di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut (karena seluruh variabel dalam bentuk LN, koefisien diinterpretasikan sebagai elastisitas):

1. Nilai konstanta sebesar -9,0678 menunjukkan bahwa apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggap konstan atau bernilai nol, maka nilai LN ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar -9,0678 (konstanta tidak memiliki interpretasi ekonomi yang substantif)..
2. Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar -0,4542 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PAD sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,4542 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien negatif menunjukkan bahwa PAD memiliki hubungan berlawanan arah terhadap ketimpangan antarwilayah, sehingga peningkatan PAD cenderung menurunkan ketimpangan pembangunan.

3. Nilai koefisien variabel Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 0,1661 persen menunjukkan bahwa setiap kenaikan DBH sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 16,61%, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif menunjukkan bahwa DBH memiliki hubungan searah terhadap ketimpangan antarwilayah.
4. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,9760 persen menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAU sebesar 1 persen akan meningkatkan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 197,60%, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien positif menunjukkan bahwa DAU memiliki hubungan searah terhadap ketimpangan antarwilayah, sehingga peningkatan DAU cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan.
5. Nilai koefisien variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar -0,6787 menunjukkan bahwa setiap kenaikan DAK sebesar 1 persen akan menurunkan ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,6787 persen, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien negatif menunjukkan bahwa DAK memiliki hubungan berlawanan arah terhadap ketimpangan antarwilayah, sehingga peningkatan DAK cenderung mengurangi ketimpangan pembangunan.

### Uji Hipotesis

Pengujian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji t (parsial) dan uji F (simultan). Adapun hasil estimasi regresi data panel yang diperoleh menggunakan model terbaik dalam penelitian ini, yaitu *Random Effect Model* (REM), adalah sebagai berikut:

### Uji t (parsial)

Dalam pengujian hipotesis ini dilakukan uji t (parsial) untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara individu. Uji hipotesis secara parsial dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

**Tabel 6. Uji t (Parsial)**

**Dependent Variable: Y**

**Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)**

**Date: 03/10/26 Time: 06:33**

**Sample: 2020 2024**

**Periods included: 5**

**Cross-sections included: 10**

**Total panel (balanced) observations: 50**

**Swamy and Arora estimator of component variances**

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.  |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| C        | -9.067788   | 4.131093   | -2.195010   | 0.0334 |
| PAD      | -0.454179   | 0.247726   | -1.833389   | 0.0734 |
| DBH      | 0.166061    | 0.125280   | 1.325522    | 0.1917 |
| DAU      | 1.975958    | 0.773504   | 2.554554    | 0.0141 |
| DAK      | -0.678676   | 0.144539   | -4.695446   | 0.0000 |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh pada tabel 6 diatas, menunjukkan bahwa:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Ketimpangan Antarwilayah (Y)  
Berdasarkan hasil regresi, koefisien Pendapatan Asli Daerah (PAD) bernilai negatif sebesar -0,454179 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0734. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari

tingkat signifikansi 0,05 ( $0,0734 > 0,05$ ), sehingga H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Ketimpangan Antarwilayah (Y)  
Berdasarkan hasil regresi, koefisien Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai positif sebesar 0,166061 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1917. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,1917 > 0,05$ ), sehingga H2 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Ketimpangan Antarwilayah (Y)  
Berdasarkan hasil regresi, koefisien Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif sebesar 1,975958 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0141. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,0141 < 0,05$ ), sehingga ditolak sehingga H3 ditolak, karena meskipun signifikan, arah koefisiennya positif sehingga berlawanan dengan hipotesis yang menduga DAU berpengaruh negatif. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) cenderung meningkatkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
4. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Ketimpangan Antarwilayah (Y)  
Berdasarkan hasil regresi, koefisien Dana Alokasi Khusus (DAK) bernilai negatif sebesar -0,678676 dengan nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,0000 < 0,05$ ), sehingga H4 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung menurunkan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

### Uji F (Simultan)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh seluruh variabel independen di dalam model terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut adalah hasil uji simultan dalam penelitian ini:

**Tabel 7. Uji Simultan (F)**

#### Weighted Statistics

|                    |           |                    |          |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE           | 0.322103  | R-squared          | 0.376009 |
| Mean dependent var | -0.225975 | Adjusted R-squared | 0.320544 |
| S.D. dependent var | 0.411901  | S.E. of regression | 0.339527 |
| Sum squared resid  | 5.187526  | F-statistic        | 6.779118 |
| Durbin-Watson stat | 1.887559  | Prob(F-statistic)  | 0.000233 |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi pada tabel di atas, diperoleh nilai F-statistic sebesar 6,779118 dengan nilai Prob(F-statistic) sebesar 0,000233. Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $0,000233 < 0,05$ ), sehingga H5 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**  
**Weighted Statistics**

|                    |           |                    |          |
|--------------------|-----------|--------------------|----------|
| Root MSE           | 0.322103  | R-squared          | 0.376009 |
| Mean dependent var | -0.225975 | Adjusted R-squared | 0.320544 |
| S.D. dependent var | 0.411901  | S.E. of regression | 0.339527 |
| Sum squared resid  | 5.187526  | F-statistic        | 6.779118 |
| Durbin-Watson stat | 1.887559  | Prob(F-statistic)  | 0.000233 |

Sumber: Hasil Output Eviews 12

Nilai *R-squared* sebesar 0,376009 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menjelaskan variasi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 37,60 persen. Sedangkan sisanya sebesar 62,40 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel yang telah dilakukan, model yang tepat yang digunakan yaitu *random effect model*, maka dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki koefisien sebesar -0,454179 dengan nilai probabilitas 0,0734. Nilai tersebut menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun tidak signifikan secara statistik. Peningkatan PAD cenderung diikuti oleh penurunan tingkat ketimpangan, tetapi pengaruhnya belum cukup kuat dalam menjelaskan variasi ketimpangan antarwilayah.

Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, peningkatan kemampuan keuangan daerah dapat mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi yang lebih merata (Oates, 2005). Kemampuan daerah dalam membiayai sektor produktif juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan (Godaro & Smith, 2011).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Harun Nur Jamiel dkk. (2022) yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Ketidaksignifikanan pengaruh PAD dalam penelitian ini berkaitan dengan distribusi kapasitas fiskal yang belum merata serta tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi PAD terhadap pemerataan pembangunan belum optimal sehingga pengaruhnya terhadap pengurangan ketimpangan masih terbatas.

#### Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki koefisien sebesar 0,166061 dengan nilai probabilitas 0,1917. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DBH berpengaruh

positif terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun tidak signifikan secara statistik. Peningkatan DBH cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan, tetapi pengaruhnya belum cukup kuat dalam menjelaskan variasi ketimpangan antarwilayah.

Dana Bagi Hasil merupakan dana transfer pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan meningkatkan kapasitas fiskal dan mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah (Oates, 2005). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi DBH belum sepenuhnya mampu menciptakan pemerataan pembangunan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Sidik & Hidayat (2020) dan Sari (2025) yang menunjukkan bahwa DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan. Ketidaksignifikanan pengaruh DBH berkaitan dengan distribusi dana yang lebih dipengaruhi oleh potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Daerah dengan sektor pertambangan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi yang lebih berkembang cenderung memperoleh DBH lebih besar dibandingkan daerah dengan potensi ekonomi terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan manfaat pembangunan lebih terkonsentrasi pada wilayah tertentu sehingga pemerataan pembangunan belum optimal. Pemanfaatan DBH yang masih lebih banyak diarahkan pada belanja rutin dibandingkan pembangunan produktif juga menyebabkan dampaknya terhadap pengurangan ketimpangan menjadi relatif terbatas.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hasil estimasi menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0141 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020–2024. Arah hubungan DAU bersifat positif, yang berarti peningkatan DAU cenderung diikuti oleh peningkatan ketimpangan antarwilayah. Dana Alokasi Umum merupakan instrumen transfer fiskal pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi kesenjangan kapasitas fiskal antar daerah melalui mekanisme pemerataan fiskal (Oates, 2005). Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan DAU belum sepenuhnya mampu mendorong pemerataan pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Irmanelly (2025) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum belum mampu menurunkan ketimpangan pembangunan secara optimal. Penelitian Sidik & Hidayat (2020) juga menunjukkan bahwa efektivitas dana perimbangan dalam mengurangi ketimpangan dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan keuangan daerah dan arah kebijakan pembangunan masing-masing wilayah.

Kondisi tersebut berkaitan dengan penggunaan DAU yang masih didominasi untuk belanja rutin pemerintah daerah, terutama belanja pegawai dan operasional birokrasi, sehingga alokasi untuk pembangunan produktif masih terbatas (Kemenkeu, 2022). Efektivitas pemanfaatan DAU juga dipengaruhi oleh kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan melaksanakan pembangunan (Edwards III, 1980). Perbedaan struktur ekonomi antarwilayah menyebabkan daerah dengan sektor pertambangan, perdagangan, jasa, dan pariwisata berkembang lebih cepat dibandingkan daerah yang masih bergantung pada sektor pertanian tradisional (Todaro & Smith, 2011). Kondisi tersebut menyebabkan ketimpangan antarwilayah masih tetap terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki koefisien sebesar -0,678676 dengan nilai probabilitas 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Koefisien negatif mengindikasikan bahwa peningkatan DAK cenderung diikuti oleh

penurunan tingkat ketimpangan antarwilayah. Dengan demikian, DAK mampu mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana transfer yang penggunaannya diarahkan secara khusus pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, sanitasi, irigasi, serta pelayanan publik lainnya. Berbeda dengan DAU yang dalam praktiknya banyak digunakan untuk belanja rutin pemerintahan, pemanfaatan DAK lebih difokuskan pada pembangunan fisik dan program pelayanan masyarakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat luas. Penyebaran manfaat DAK juga relatif lebih merata karena menjangkau berbagai sektor dan wilayah, terutama daerah yang memiliki keterbatasan kapasitas fiskal dan infrastruktur pembangunan.

Kondisi tersebut menyebabkan DAK memiliki dampak yang lebih besar terhadap pemerataan pembangunan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan sarana publik melalui DAK mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar serta mendorong aktivitas ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan DAK dapat membantu memperkecil kesenjangan pembangunan antar daerah sehingga ketimpangan antarwilayah cenderung menurun. Selain itu, penggunaan DAK yang bersifat spesifik dan terarah menyebabkan efektivitas pemanfaatannya lebih mudah dikontrol dibandingkan dana transfer yang bersifat umum. Hal tersebut membuat DAK lebih mampu mendorong pemerataan hasil pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Temuan ini didukung oleh penelitian Sidik & Hidayat (2020) yang menunjukkan bahwa DAK berpengaruh signifikan dalam menurunkan ketimpangan antarwilayah karena penggunaannya difokuskan pada pembangunan sektor prioritas daerah. Penelitian Sari (2025) juga menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan penelitian Triyulianto dkk. (2024) menjelaskan bahwa DAK mampu menurunkan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pembangunan dan pelayanan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa DAK merupakan instrumen fiskal yang relatif efektif dalam mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **Pengaruh Secara Simultan (Bersama-sama)**

Nilai *R-squared* sebesar 0,376009 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mampu menjelaskan variasi ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 37,60 persen. Sedangkan sisanya sebesar 62,40 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh yang cukup dalam menjelaskan ketimpangan antarwilayah, meskipun masih terdapat faktor-faktor lain yang turut memengaruhi ketimpangan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pertumbuhan ekonomi, investasi daerah, kualitas infrastruktur, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia karena ketimpangan pembangunan antarwilayah dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas ekonomi, kualitas sumber daya manusia, serta ketersediaan infrastruktur antar daerah (Kuncoro, 2018).

### **KESIMPULAN**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan DAU sebesar 1 persen meningkatkan ketimpangan sebesar 1,976 persen, sehingga H3 ditolak.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenaikan DAK sebesar 1 persen menurunkan ketimpangan sebesar 0,679 persen, sehingga H4 diterima.
5. Secara simultan, variabel PAD, DBH, DAU, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan antarwilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## SARANA

Berdasarkan hasil penelitian, saran kebijakan yang dapat diajukan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah kabupaten/kota, DAU yang terbukti berpengaruh positif terhadap ketimpangan perlu diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pemerataan, dengan menetapkan porsi minimum DAU untuk perbaikan sarana dan prasarana publik (jalan, sekolah, puskesmas, sanitasi) agar tidak didominasi belanja pegawai dan operasional birokrasi.

Kedua, karena DAK terbukti menurunkan ketimpangan, pemerintah daerah perlu mempercepat perencanaan dan realisasi DAK, terutama di daerah berkapasitas fiskal rendah seperti Lombok Utara, Dompu, dan Bima, serta memperkuat pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran.

Ketiga, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan bersama Pemerintah Provinsi NTB perlu mempertimbangkan penyesuaian formula alokasi DAU dan DAK dengan memberi bobot lebih besar pada indikator ketertinggalan infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Keempat, karena PAD dan DBH belum berpengaruh signifikan, pemerintah daerah perlu meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, serta memanfaatkan DBH untuk belanja produktif dan bukan belanja rutin.

Kelima, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti investasi, kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia, memperpanjang periode pengamatan, atau menggunakan model panel dinamis agar hasil lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. H. (2018). Desentralisasi dan pengelolaan perekonomian daerah. Grup Penerbitan CV Budi Utama.
- Aryasatya. (2024). Transfer pemerintah pusat sebagai wujud desentralisasi fiskal dalam pertumbuhan ekonomi daerah sebagai bentuk upaya mengatasi ketimpangan pendapatan efektif atau tidak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEB17)*, 97–100. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i02.7361>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2024, December 31). PDRB per kapita atas dasar harga konstan menurut kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Retrieved September 19, 2025, from BPS NTB
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025a). Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut lapangan usaha 2020–2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025b). Produk domestik regional bruto Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut pengeluaran 2020–2024.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2021). Analisis data panel dalam penelitian ekonomi dan bisnis (dilengkapi dengan penggunaan EViews). Katalog Dalam Terbitan (KDT).
- Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (1998). Fiscal decentralization in developing countries. In *Encyclopedia of Public Administration and Public Policy* (pp. 770–775).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024, December 31). Portal data APBD. Retrieved September 19, 2025, from Direktorat Jenderal Pajak
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024, December 31). Postur TKDD. Retrieved

- September 19, 2025, from DJPK Kemenkeu
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Elsye, R. (2013). *Desentralisasi fiskal*. Alqaprint Jatinangor.
- Gluschenko, K. (2015). Williamson's fallacy in estimation of inter-regional inequality. Munich Personal RePEc Archive, 2–6.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Irmanelly. (2025). Mengevaluasi peran desentralisasi fiskal: Analisis terhadap penurunan ketimpangan pendapatan di daerah. *Development*, 62–74. <https://doi.org/10.53978/jd.v13i1.584>.
- Kanbur, R. (2017). Structural transformation and income distribution: Kuznets and beyond. African Development Bank Group, 1–14.
- Miar. (2024). Analisis pengaruh desentralisasi fiskal, investasi, dan kinerja keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah. *Cendekia (Education and Teaching)*, 73–83. <https://doi.org/10.30957/cendekia.v18i1.887>.
- Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia. *Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 19–26. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>.
- Mursalin, D. (2025). Menyeimbangkan pertumbuhan, pemerataan, dan kewilayahan: Dilema desentralisasi dalam pembangunan Indonesia. *Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 58–70. <https://doi.org/10.29244/jekp.14.1.2025.58-82>.
- Nisa, C. F. (2025). Analisis ketimpangan pembangunan. *E-Journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)*, 455–464. <https://doi.org/10.23960/efebe.v3i2.254>.
- Oates, W. E. (2005). Toward a second-generation theory of fiscal federalism. *International Tax and Public Finance*, 350–368. <https://doi.org/10.1007/s10797-005-1619-9>.
- Perdana, M. A. C. (2024). *Membangun ekonomi lokal berbasis UMKM*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Permana, S. H. (2017). *Desentralisasi fiskal dan persaingan usaha*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Perroux, F. (n.d.). *Growth pole theory*. Pangeography.
- Purba, B., & Anindya, D. A. (2024). *Ekonomi publik*. Yayasan Kita Menulis.
- Richardson, H. W. (1973a). *Regional growth theory*. The Macmillan Press Ltd.
- Richardson, H. W. (1973b). Regional growth theory and policy: A review. *Urban Studies*, 10(3), 389–405.
- Ridho, & Malik, M. A. (2021). Analisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil pajak, dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*, 6–23. <https://doi.org/10.20885/JKEK.vol1.iss1.art7>.
- Sahir. (2022). *Metodologi penelitian*. KBM Indonesia.
- Sari, Y. P. (2025). Dapatkah dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil menurunkan ketimpangan pendapatan di Indonesia? *Ekonomi Al-Hikmah*, 14–23. <https://doi.org/10.36378/khitmah.v7i1.4061>.
- Sidik, M., & Hidayat, S. (2020). Dampak alokasi perimbangan (DAU, DAK, DBH) terhadap tingkat ketimpangan antar daerah di Provinsi Jambi. *Paradigma Ekonomika*, 229–231. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v15i2.10325>.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Addison-Wesley
- Triyulianto, T., Nurvita, B. S., & Hidayaturrahmi. (2024). Pengaruh realisasi dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja bantuan sosial dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan. *Good Governance*, 112–128. <https://doi.org/10.32834/gg.v20i2.807>.



Williamson, J. G. (1965). Regional inequality and the process of national development: A description of the patterns. *Economic Development and Cultural Change*, 13(4), 3–45. <https://doi.org/10.1086/450136>.